



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TABALONG**

LAPORAN RANCANGAN AKHIR RENJA



**20
25**

(0526) 2031693

<https://bpkad.tabalongkab.go.id/>



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 245 /2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait adanya pergeseran anggaran baik berkurang maupun bertambah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dalam rangka mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323];
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
 20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 245 /2025
TANGGAL 1 Juli 2025.

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

1.	Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
2.	Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD
3.	Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah
4.	Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.	Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6.	Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah
7.	Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8.	Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
12.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial
15.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja
16.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
18.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
19.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan
22.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
23.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
24.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
26.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

27.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan
28.	Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
29.	Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim
30.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung
31.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Murung pudak
32.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanta
33.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus
34.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banua Lawas
35.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kelua
36.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pugaan
37.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaro
38.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Uya
39.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Haruai
40.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Upau
41.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bintang Ara



BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 selesai disusun.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini merupakan penjelasan secara ringkas mengenai rencana kerja yang disusun dalam rangka pelaksanaan APBD dan sekaligus merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang telah diamanatkan untuk mencapai misi organisasi. Saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini.

Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dari semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini. Semoga bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Tabalong.

Tanjung, Juli 2025

Kepala Badan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
- c. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42860);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah

Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- q. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan
- r. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 tentang 69);
- s. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2026
- t. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 188.45/16/2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tabalong Tahun 2025
- u. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong. Perubahan Rencana Kerja juga dijadikan sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun berjalan, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun yang akan datang.

1.1.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong ini adalah:

- a. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
- b. Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja instansi.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Perubahan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan Pokok-pokok materi yang disajikan:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan

dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian tentang:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lainnya.
- Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:
- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 - b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

- 3.3. Program dan Kegiatan

Berisi tentang:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja (Rencana Kerja) SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra (Rencana Strategis) SKPD

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)

Kode	(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan 2025			(9)	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 -2026	
									Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 s/d TW I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
5	02				KEUANGAN									
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB	A	BB	A				
5	02	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	13 Dokumen	100	25	25	100	25	100%
5	02	01	2	01	Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	100%
5	02	01	2	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	100
5	02	01	2	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	100	100

5	02	01	2	01	03	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1	100
5	02	01	2	01	03	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1	100
5	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akurat dan tepat waktu	100	17 Dokumen	100	25	25	25	100	25	100
5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	50 Orang	56 Orang	50 Orang	100	50 Orang	100	50 Orang	25	100
5	02	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	1 Laporan	17 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	100	1 Laporan	25	100
5	02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	100%	100%	25	25%	25	100%	25%	100
5	02	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	70 Stel	1 Paket	0	0	0	1 Paket	0	100
5	02	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Org	7 Org	7 Org	25	25	25	7 Org	25	100%
5	02	01	2	05	#	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	56	100	56	25	25	25	56	56	100
5	02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	100%	100%	25	25%	25	50%	25%	100
5	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	100	3 Paket	100	-	100	3 Paket	-	100

5	02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	40 item	4 Paket	1 Paket	25	25	100	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	100	4 Paket	1 Paket	25	25	100	100
5	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	4 bulan	25	25	100	100
5	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	97 org x keg	4 Laporan	1 Laporan	25	25	100	100
						Penatausahaan Arsip dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100	100	100				100	100
5	02	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 buah	3	3	0	-	-	100	100
5	02	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	49 item	20 item	-	-	-	100	100
5	02	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Baru atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan gedung baru	-	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	100%	100%	25	25	25%	100%	100
5	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	2	805 Lembar	2	1	25	25	100	100%

5	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	36 Rekening / bulan	12	4	25	25	100	100%
5	02	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	4 bulan	25	25	100	100%
5	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	100%	100%	25%	25	25%	100%	100%
5	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 unit	38 unit	38 unit	25	25	100	100%	100%
5	02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	100%	12	4	25	25	25	100%
5	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 buah	1 buah	1 buah		25	25	25	100%
5	02	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang di alokasikan melalui TKD	30	23,60	30		30	30		30
						Meningkatnya tata Kelola Anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40	42	40		40	40		40
5	02	02	2	01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	100%	100%	100%	25%	25	25%	100%	100%
5	02	02	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dok	2 Dokumen	2 Dok	1 Dokumen	25	25	100	100%
5	02	02	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun	2 Dok	2 Dokumen	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok		
5	02	02	2	01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	41 Dokumen	46 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	100	46 Dokumen	41 Dokumen	100%

5	02	02	2	02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Lap	100	100	100	12 Lap	6 Laporan	100%
5	02	02	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi/Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak ke tiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan realisasi penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak ketiga (PFK)	24 Dok	24 Dok	24 Dok	100	24 Dok	12 Dokumen	100%
5	02	02	2	02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100	12 Dok	6 Dokumen	100%
5	02	02	2	02	#	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	46 Orang	100%	100%	100	46 Orang	41 Org	100%
						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERA								
						Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan tepat Waktu							

5	02	02	2	03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
5	02	02	2	03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kwajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan - LO dan Beban	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100	12 Lap	6 Laporan	100%	100%
5	02	02	2	03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	1 Dok	100%	100%
5	02	02	2	03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	1 Dokumen	100%	100%
						Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok			
5	02	02	2	03	#	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah/Kota	82 org	82 org	82 org	100	82 org	82 Orang	100%	100%
5	02	02	2	04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	6 bulan	100%	100%

5	02	02	02	04	04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap		100
5	02	02	02	04	08	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota, Pemerintah Desa	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap		100
5	02	02	02	04	09	09	Pengelolaan Dana Darurat	Terpenuhi Dana Darurat dan Mendesak	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap		100
5	02	02	02	04	#	#	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terpenuhi pengelolaan Dana Bagi Hasil	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap		100
5	02	03					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		100%	100%	100%	100	100%		100
							Meningkatnya tata kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	14	13	14	14		14	14
5	02	03				01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	14	13	14	14		14	14
5	02	03	02	01	01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen penyusunan standar harga sesuai ketentuan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1	1
5	02	03	02	01	03	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penyusunan perencanaan kebutuhan BMD sesuai ketentuan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok		100
5	02	03	02	01	05	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok		100
5	02	03	02	01	06	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan inventarisasi BMD sesuai ketentuan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok		100
5	02	03	02	01	07	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah pemindahtanganan dan sertifikasi tanah pemerintah daerah	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap		100

5	02	03	2	01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan penilaian BMD sesuai ketentuan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok		100
5	02	03	2	01	#	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan pemindahtanganan BMD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok		100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin dan tidak melaksanakan pelayanan kepada masyarakat maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong tidak memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Pengelolaan Keuangan dan Keuangan Daerah digunakan Indikator Kinerja utama dan Indikator Kinerja Kunci atau IKD sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kabupaten Tabalong.

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala–kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Analisis capaian kinerja atas sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

1. Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu

Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan APBD secara tepat waktu mencerminkan kesiapan perencanaan, koordinasi antar perangkat daerah, serta komitmen terhadap tata kelola keuangan yang baik. Ketepatan waktu dalam penetapan APBD sangat penting agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. Proses penyusunan APBD Kabupaten Tabalong adalah setelah selesainya KUA-PPAS atau Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang waktunya paling lambat minggu II bulan Agustus sampai dengan batas akhir penetapan APBD pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan, sehingga dapat diketahui jumlah waktu yang tersedia bagi penyusunan APBD yaitu selama 142 hari kalender. Capaian dari indikator kinerja Persentase ketepatan waktu Penyusunan dan Penetapan APBD yaitu

dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Tanggal Penetapan APBD}}{\text{Target Tanggal Penetapan APBD}} \times 100\%$$

2. Persentase Penatausahaan Keuangan yang berkualitas

Indikator ini mengukur tingkat kualitas penatausahaan keuangan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berdasarkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, seperti ketepatan waktu pencatatan, kelengkapan dokumen, akurasi data, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penatausahaan keuangan yang berkualitas mencerminkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimana Peningkatan persentase penatausahaan keuangan yang berkualitas menjadi indikator keberhasilan dalam penguatan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi di bidang keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 149 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran Bab V tentang Pelaksanaan dan Penataan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Jika dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Sedangkan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Kabupaten Tabalong dilaksanakan berdasarkan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan Jenis Belanjanya sebagaimana telah diuraikan di atas terbagi dalam 2 (dua) jenis belanja yaitu Belanja Gaji/Tunjangan dan Belanja Operasi.

Capaian dari indikator kinerja Persentase Penatausahaan Keuangan yang berkualitas dengan formulasi sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah Dokumen/Transaksi Perbendaharaan yang sesuai Ketentuan}}{\text{Total Dokumen Transaksi Perbendaharaan yang di Periksa}} \times 100\%$

Dalam penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah ini menjelaskan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, ditandai dengan terselenggaranya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah sesuai ketentuan, Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi, Analisis Perencanaan & Penyaluran Bantuan Keuangan, pengelolaan dana darurat dan mendesak, serta terlaksananya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk Penyaluran Bantuan Keuangan ini ada 121 Desa dengan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten kepada Desa (Bantuan Keuangan ADD) dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah/Desa. Dengan adanya ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola bantuan keuangan kabupaten, meminimalisir potensi penyalahgunaan, serta memastikan manfaat bantuan benar-benar dirasakan masyarakat.

3. Persentase Penyelesaian dan Penyampaian LKPD tepat Waktu dan Sesuai SAP.

Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam menyelesaikan dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP merupakan bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. LKPD yang disusun dan disampaikan secara tepat waktu memungkinkan proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan sesuai jadwal, serta menjadi dasar

pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan persentase indikator ini mencerminkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, kepatuhan terhadap peraturan, serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 191 ayat (2), dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran Bab VII Huruf B Nomor 1 Bagian H Bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tabalong merupakan gabungan laporan keuangan Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong. Kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAP adalah syarat normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang memiliki manfaat bagi pengguna laporan keuangan. (Paragraf 32 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) Sedangkan kriteria agar laporan keuangan pemerintah berkualitas, yaitu:

- Relevan, laporan keuangan dikatakan relevan apabila keputusan pengguna dipengaruhi oleh informasi yang termuat didalamnya dengan membantu pengguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi tersebut.
- Andal, laporan keuangan andal berarti informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta diverifikasi.

Capaian dari indikator kinerja Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Tanggal Penyampaian LKPD}}{\text{Target Tanggal Penyampaian LKPD}} \times 100\%$$

4. Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan BMD

Indikator ini menggambarkan peningkatan kapasitas dan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas pengelolaan aset mencakup seluruh siklus pengelolaan barang milik daerah (BMD), mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, hingga penghapusan dan pelaporan. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset berkontribusi langsung terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah dan merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 3 Pengelolaan Aset Daerah Harus dilakukan secara akuntabel, transparan dan Profesional. Rekonsiliasi antara bidang aset dan akuntansi dilaksanakan setiap bulan berjalan untuk mengetahui realisasi belanja modal. Sedangkan rekonsiliasi antara bidang aset dan SKPD dilaksanakan tiap bulan juga untuk mengetahui mutasi tambah/kurang baik dari belanja modal, belanja pegawai, mutasi antar SKPD dan koreksi catat. Untuk memverifikasi laporan aset pada setiap SKPD dilakukan melalui kegiatan rekonsiliasi dengan bidang aset dan akuntansi setiap bulan yang dituangkan dalam kertas kerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong mengupayakan untuk Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan BMD tepat waktu Dengan perhitungan sebagai berikut:

$\frac{\text{Jumlah Laporan yang disampaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah seluruh Laporan yang Wajib disampaikan}}$	$\times 100\%$
---	----------------

5. Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD menjadi indikator yang cukup menentukan terhadap kualitas kinerja SKPD, karena semakin baik nilai evaluasi AKIP SKPD menunjukkan bahwa pola manajemen dalam suatu organisasi telah berjalan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dimana seluruh unsur tersebut menentukan tingkat keberhasilan SKPD dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan yang diperkuat dengan komitmen dari semua bidang untuk melaksanakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan melaksanakan Perjanjian Kinerja. Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong menargetkan dengan nilai 80,50 (A) dengan capaian memuaskan.

Tabel 2.2 (TC. 23) Capaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP										
2	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu				100	100	100	100	100	50					50				
3	Persentase Penatausahaan Keuangan yang berkualitas				100	100	100	100	100	50					50				
4	Persentase Penyelesaian dan Penyampaian LKPD tepat Waktu dan Sesuai SAP				100	100	100	100	100	100					100				
6	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan BMD				100	100	100	100	100	50					50				
7	Predikat nilai AKIP Perangkat daerah				A	A	A	A	A										

2.3. Analisis Kinerja Perangkat daerah Pelayanan SKPD

Indikator Kinerja Kunci (IKK) di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) adalah ukuran utama yang dipakai untuk menilai sejauh mana kinerja BPKAD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah (aset)..

Indikator ini menggambarkan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan aset secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, yang tercermin melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, ketepatan pengelolaan kas dan utang daerah, penyajian laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu dengan opini audit yang baik, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta penyediaan layanan administrasi keuangan dan barang milik daerah yang mendukung kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Adapun Analisis capaian kinerja atas sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

Tabel . 2.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.02 - KEUANGAN										
2.	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	positif	%	16,11	19,20	22,30	25,35	28,48	31,57	34,46	
3.	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	positif	%	32,11	34,70	37,28	39,87	42,45	45,03	47,62	
4.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	positif	%	84,43	84,80	85,17	85,53	85,90	86,26	86,63	
5.	Manajemen Aset	positif	Kategori	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	positif	%	9,50	9,64	9,78	9,92	10,06	10,20	10,35	
8.	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	positif	%	52,44	53,89	55,34	56,80	58,25	59,70	61,15	
9.	Rasio PAD	positif	%	9,28	9,98	10,68	11,38	12,08	12,77	13,47	
10.	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	positif	%	6,88	7,89	8,90	9,92	10,93	11,94	12,95	
11.	Opini Laporan Keuangan	positif	Indeks	10	10	10	10	10	10	10	

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sesuai tugas pada saat ini adalah membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Adapun Fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Pelaksanaan administrasi badan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Walaupun dalam menjalankan fungsi pelayanan menghadapi beberapa kendala, namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

- a. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Semakin berkembangnya dinamika tuntutan pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel.
- c. Masih kurang tersedianya infrastruktur dan teknologi informasi yang menunjang kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. SKPD belum memahami pedoman penyusunan RKA SKPD dan ketentuan yang berlaku.
- f. Laporan keuangan SKPD yang disampaikan belum lengkap sesuai SAP dan tidak tepat waktu.

- g. Perubahan yang cepat terhadap regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, yang memaksa Pemerintah Daerah untuk menyesuaikannya.

Adapun solusi dan upaya pemecahan terhadap permasalahan tersebut antara lain:

- a. Peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Peningkatan infrastruktur dan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD Kabupaten Tabalong, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat.
- f. Melakukan revisi berbagai ketentuan dan peraturan dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- g. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi pedoman penyusunan anggaran.
- h. Melakukan rekon secara berkala baik terhadap pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

2.5. Reviu Terhadap Rancangan RKPD

Reviu terhadap RKPD tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.5. sebagai berikut:

Tabel 2.5

Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025

Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tabalong

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP	BB	29.283.577.033	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	51.635.296.722	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100	90.625.990	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	100	90.625.990	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	27.707.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	27.707.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	19.579.870	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	19.579.870	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	35.338.320	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	35.338.320	
	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dok	5.000.000	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dok	5.000.000	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	BPKAD	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Dok	3.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	BPKAD	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Dok	3.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100	12.761.416.100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	100	12.761.416.100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	50 Orang	12.751.119.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	50 Orang	12.751.119.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 BPKAD	4 Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	5 1 Lap	6 10.297.100	7 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 BPKAD	9 Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	10 17 Lap	11 10.297.100	12
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	497.070.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	100%	497.070.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	97.070.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	97.070.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Org	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Org	100.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	56	300.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	56	300.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	1.635.414.074	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	100%	1.635.414.074	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	50.570.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	50.570.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	245.140.036	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	245.140.036	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	107.433.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	107.433.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	97.063.638	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	97.063.638	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.135.207.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.135.207.400	

Rancangan Awal RKPD												Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif						
1	5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	10.634.039.983	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	100%	33.605.128.412						
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BPKAD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	10.042.941.712	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BPKAD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	32.484.995.712						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Item	591.098.271	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Item	1.120.132.700						
	Pengadaan Gedung Baru atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Ketersediaan gedung baru			Pengadaan Gedung Baru atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Ketersediaan gedung baru								
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	1.495.700.886	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	100%	1.565.700.886						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	9.740.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	805 lbr	9.740.500						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	412.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	412.600.000						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	1.073.360.386	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	1.143.360.386						
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	2.169.310.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	100%	1.479.941.260						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	781.170.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	781.170.000						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	336.140.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	336.140.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BPKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Buah	1.052.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Buah	362.631.260	
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase penetapan APBD tepat waktu	100	844.614.208	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase penetapan APBD tepat waktu	100	835.014.308	
			Persentase Penatausahaan keuangan yang berkualitas	100	265.995.547			Persentase Penatausahaan keuangan yang berkualitas	100	265.995.042	
			Persentase Penyelesaian dan Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan sesuai SAP	100	557.421.910			Persentase Penyelesaian dan Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan sesuai SAP	100	536.547.098	
	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran		Ketepatan Waktu Penyampaian KUA - PPAS, RAPBD, dan Perda APBD Induk dan Perubahan	Tepat Waktu		Meningkatnya Tata Kelola Anggaran		Ketepatan Waktu Penyampaian KUA - PPAS, RAPBD, dan Perda APBD Induk dan Perubahan	Tepat Waktu		
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen KUA-PPAS, Perubahan KUA-PPAS, Dokumen Perbup dan Perda APBD serta perubahan Perbup dan Perda APBD	100 Dok	844.614.208	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen KUA-PPAS, Perubahan KUA-PPAS, Dokumen Perbup dan Perda APBD serta perubahan Perbup dan Perda APBD	100 %	835.014.308	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah dokumen perencanaan dan penyusunan anggaran daerah tepat waktu	2 Dok	194.260.920	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah dokumen perencanaan dan penyusunan anggaran daerah tepat waktu	2 Dok	194.260.920	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah dokumen perencanaan dan penyusunan anggaran daerah tepat waktu	2 Dok	37.665.520	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah dokumen perencanaan dan penyusunan anggaran daerah tepat waktu	2 Dok	37.665.520	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang terfasilitasi	46 Dok	77.360.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	46 Dok	77.360.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah DPA SKPD yang terfasilitasi			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah DPA SKPD yang tersusun			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 BPKAD	4 Jumlah dokumen Perda APBD yang tersusun	5 2 Dok	6 243.103.220	7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	8 BPKAD	9 Jumlah dokumen Perda APBD yang tersusun	10 2 Dok	11 243.103.220	12
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah dokumen APBD Perubahan yang tersusun	2 Dok	156.424.148	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah dokumen APBD Perubahan yang tersusun	2 Dok	151.424.148	
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Cakupan regulasi penyusunan anggaran daerah tepat waktu	100%	136.200.000	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Cakupan regulasi penyusunan anggaran daerah tepat waktu	100%	131.200.000	
	Meningkatnya tata Kelola Perbendaharaan		Persentase laporan Perbendaharaan yang tepat waktu	100		Meningkatnya tata Kelola Perbendaharaan		Persentase laporan Perbendaharaan yang tepat waktu	100		
			Persentase Pencairan Anggaran sesuai Pedoman	100				Persentase Pencairan Anggaran sesuai Pedoman	100		
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Persentase Penerbitan dan Pencairan SP2D dan Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100	265.995.547	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Persentase Penerbitan dan Pencairan SP2D dan Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100	265.995.042	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah laporan rekonsiliasi kas daerah dan anggaran kas SKPD tepat waktu	12 Lap	51.601.990	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah laporan rekonsiliasi kas daerah dan anggaran kas SKPD tepat waktu	12 Lap	51.601.769	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Persentase penerbitan anggaran kas dan SPD yang sesuai dengan Kasda	100%	4.023.660	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Persentase penerbitan anggaran kas dan SPD yang sesuai dengan Kasda	100%	4.023.660	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer tepat waktu	12 Lap	47.769.300	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer tepat waktu	12 Lap	47.769.273	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran	BPKAD	Jumlah dokumen kasda dan PFK yang telah direkon	24 Dok	32.562.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran	BPKAD	Jumlah dokumen kasda dan PFK yang telah direkon	24 Dok	32.561.911	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2 Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Filhak Ketiga (PFK)	3	4 Jumlah dokumen rekonsiliasi data penerimaan dan pengelolaan kasda tepat waktu	5 12 Dok	6 58.930.136	7 Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Filhak Ketiga (PFK)	8 BPKAD	9 Jumlah dokumen rekonsiliasi data penerimaan dan pengelolaan kasda tepat waktu	10 12 Dok	11 58.930.078	12
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah dokumen rekonsiliasi data penerimaan dan pengelolaan kasda tepat waktu	12 Dok	58.930.136	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah dokumen rekonsiliasi data penerimaan dan pengelolaan kasda tepat waktu	12 Dok	58.930.078	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Persentase berkas SPP dan SPM yang dinyatakan lengkap dan sah	100%	71.108.461	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Persentase berkas SPP dan SPM yang dinyatakan lengkap dan sah	100%	71.108.354	
	Meningkatnya Tata Kelola Pelaporan	BPKAD	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100		Meningkatnya Tata Kelola Pelaporan		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu			
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban APBD	100	557.421.910	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban APBD		536.547.098	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	Jumlah laporan rekonsiliasi SKPD	12 Lap	152.411.140	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD	Jumlah laporan rekonsiliasi SKPD	12 Lap	152.411.140	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah draf Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dok	88.030.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah draf Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dok	88.030.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah draf raperda dan raperbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2 Dok	110.176.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah draf raperda dan raperbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2 Dok	110.176.000	
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut	1 Dokumen	26.468.000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut	1 Dokumen	26.468.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3	4 Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 82 Org	6 180.336.770	7 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	8 BPKAD	9 Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10 82 Org	11 159.461.958	12
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Terlaksananya Pengelolaan Urusan Kewenangan Keuangan Daerah	100%	402.162.907.882	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Terlaksananya Pengelolaan Urusan Kewenangan Keuangan Daerah	100%	390.662.367.705	
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	6.379.910.000	Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		6.379.909.708	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Tabalong	Tersedianya Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota, Pemerintah Desa	1 Tahun	302.610.121.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Tabalong	Tersedianya Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota, Pemerintah Desa	1 Tahun	349.932.121.000	
	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi		Jumlah Laporan kebijakan dan Alokasi Subsidi		1.032.282.978	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi		Jumlah Laporan kebijakan dan Alokasi Subsidi		1.032.282.978	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Tabalong	Terpenuhinya Dana Darurat dan Mendesak	1 Tahun	69.147.593.904	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Tabalong	Terpenuhinya Dana Darurat dan Mendesak	1 Tahun	12.871.654.017	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Tabalong	Terpenuhinya pengelolaan Dana Bagi Hasil	1 Tahun	22.993.000.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Tabalong	Terpenuhinya pengelolaan Dana Bagi Hasil	1 Tahun	20.448.400.000	
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan BMD	100%	2.031.854.400	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan BMD	100%	2.005.428.400	
	Meningkatnya tata kelola Aset Daerah		Persentase SKPD yang tertib penatausahaan BMD yang sesuai peraturan perundang-undangan	100%		Meningkatnya tata kelola Aset Daerah		Persentase SKPD yang tertib penatausahaan BMD yang sesuai peraturan perundang-undangan	100 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Ketersediaan Laporan Aset Tetap dan Persediaan semua OPD, Laporan Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100	2.031.854.400	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Ketersediaan Laporan Aset Tetap dan Persediaan semua OPD, Laporan Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	2.005.428.400	
	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah dokumen penyusunan standar harga sesuai ketentuan	1 Dok	76.925.800	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah dokumen penyusunan standar harga sesuai ketentuan	1 Dok	76.925.800	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah laporan penyusunan perencanaan kebutuhan BMD sesuai ketentuan	2 Dok	237.123.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah laporan penyusunan perencanaan kebutuhan BMD sesuai ketentuan	2 Dok	237.123.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	1 Dok	355.771.670	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	1 Dok	355.771.670	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan inventarisasi BMD sesuai ketentuan	1 Dok	340.949.930	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan inventarisasi BMD sesuai ketentuan	1 Dok	340.949.930	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah pemindahtanganan dan sertifikasi tanah pemerintah daerah	10 Persil	747.337.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah pemindahtanganan dan sertifikasi tanah pemerintah daerah	10 Persil	747.337.000	
	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan penilaian BMD sesuai ketentuan	2 Dok	76.748.000	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan penilaian BMD sesuai ketentuan	2 Dok	76.748.000	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan pemindahtanganan BMD	2 Dok	196.999.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan pemindahtanganan BMD	2 Dok	566.944.800	
	J U M L A H				435.146.370.950	J U M L A H				446.337.020.976	

2.6. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, Maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2025 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena menjalankan kegiatan yang bersifat penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah berupa fasilitasi pelayanan keuangan bagi SKPD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional dikaitkan RPJMN 2025-2029 untuk mencapai visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang diwujudkan 8 (Delapan) misi Nasional (Delapan Asta Cita.).

Sedangkan Prioritas Nasional (PN) yang ditetapkan ada 8 (Delapan) yaitu:

1. PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi. Air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. PN 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,. Prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2) dan penyandang disabilitas.
5. PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.
6. PN 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

7. PN 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi dan penyeludupan
8. PN 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong

3.2.1. Tujuan

Tujuan disusunnya rencana kerja dalam mewujudkan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong adalah:

“ Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang Transparan dan Akuntabel”

3.2.2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui rangkaian kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Penganggaran Keuangan Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah
4. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah
5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih	Tenwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	meningkatkan Kualitas Penganggaran Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola anggaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Opini BPK		
					Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu		
					Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	

				Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
				Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
				Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
				Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
				Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
				Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
				Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	

					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5.02.02.2.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN					INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5.02.02.2.01.0012 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Persentase SP2D yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai Standar Pelayanan		
					Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Meningkatnya tata kelola perbendaharaan		

					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)					INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank	5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank	

						dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
						5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pengelolaan Urusan Kewenangan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)		TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
							(07)
							(08)
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

				Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	5.02.02.2.04.0001 - Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	5.02.02.2.04.0003 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	

					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	5.02.02.2.04.0004 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	5.02.02.2.04.0005 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	5.02.02.2.04.0006 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	5.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN					INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyelesaian dan Penyampaian LKPD tepat Waktu dan Sesuai SAP		

					Meningkatnya tata kelola pelaporan	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
							Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trwulan dan Semesteran	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		

					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)

					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun	5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	

				Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah		
						5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)

					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolan Kas Daerah	5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolan Kas Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.02.02.2.02.0002 - Pengelolan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	

					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN					INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran	5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	

						Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)					
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				
						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan	5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan				

					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	5.02.02.2.04.0006 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	5.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN					INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
					Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah		
					Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
					Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah		
					Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat daerah		

				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
			Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi.	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan efisien.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

perangkat daerah dan ketentuan yang berlaku		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Tersedianya jasa penunjang kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 dapat diuraikan dengan sebagai berikut:

5	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung/bangunan kantor	Kab. Tabalong	-	1.052.000.000	(689.368.740)	362.631.260	PAD	1 buah	5.949.784.523	a	Sekretariat
5	02	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penetapan APBD tepat waktu			844.614.208	844.614.208	(9.600.000)	835.014.208			1.105.080.446		Bidang Anggaran
						Meningkatnya tata Kelola Anggaran	Persentase Penatausahaan keuangan yang berkualitas			265.995.547	265.995.547	(502)	265.995.045			627.926.159		Bidang Perbendaharaan
							Persentase Penyelesaian dan Penyempaian LKPD Tepat Waktu dan sesuai SAP			557.421.910	557.421.910	(20.874.812)	536.547.098			816.920.067		Bidang Akuntansi
							Ketepatan Waktu Penyampaian KUA - PPAS, RAPBD, dan Perda APBD Induk dan Perubahan											
5	02	02	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen KUA-PPAS, Perubahan KUA-PPAS, Dokumen Perbup dan Perda APBD serta perubahan Perbup dan Perda APBD			844.614.208	844.614.208	(9.600.000)	835.014.208			1.025.164.383		
5	02	02	2	01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen KUA PPAS	Kab. Tabalong	-	194.260.920	-	194.260.920	PAD	2 Dok	139.214.858	a	Bidang Anggaran
5	02	02	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen Perubahan KUA PPAS	Kab. Tabalong	-	37.665.920	-	37.665.920	PAD	2 Dok	152.193.798	a	Bidang Anggaran
5	02	02	2	03	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	RKA SKPD	Kab. Tabalong	-	77.360.000	-	77.360.000	PAD	41 Dok	197.339.965	a	Bidang Anggaran
5	02	02	2	01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang terfasilitasi	DPA SKPD	Kab. Tabalong	-								

5	02	02	2	03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah/Kota	PPK SKPD	Kab. Tabalong	Rp. 180.336.770,00	(20.874.812)	159.461.958	PAD	82 org	195.601.841	a	Bidang Akuntansi
						Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga yang dibina	Kab. Tabalong								
5	02	02	2	04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			402.162.907.882	(11.500.540.179)	380.662.367.703			347.934.779.461		
						Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan	Kab. Tabalong								
						Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Investasi	Kab. Tabalong								
						Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Analisis Perencanaan	Kab. Tabalong								
5	02	02	02	04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Cicilan Pokok Bunga Pinjaman	Kab. Tabalong	6.379.910.000	(282)	6.379.909.708	PAD	1 Lap	1.328.676.743		
						Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Laporan	Kab. Tabalong								

5	02	03	2	01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penyusunan perencanaan kebutuhan BMD sesuai ketentuan	BMD	Kab. Tabalong		Rp 237.123.000	-	237.123.000	PAD	2 Dok	281.553.000	a	Bidang Aset
						Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BMD	Kab. Tabalong									
5	02	03	2	01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	BMD	Kab. Tabalong		Rp 355.771.670	-	355.771.670	PAD	1 Dok	457.130.670	a	Bidang Aset
5	02	03	2	01	05	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	BMD	Kab. Tabalong		Rp 340.949.930	-	340.949.930	PAD	1 Dok	361.515.930	a	Bidang Aset
5	02	03	2	01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah pemindahtanganan dan sertifikasi tanah pemerintah daerah	BMD	Kab. Tabalong		Rp 747.337.000	-	747.337.000	PAD	1 Lap	2.361.307.290	a	Bidang Aset
5	02	03	2	01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan penilaian BMD sesuai ketentuan	BMD	Kab. Tabalong		Rp 76.748.000,00	-	76.748.000	PAD	2 Dok	312.747.741	a	Bidang Aset
						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BMD	Kab. Tabalong									
5	02	03	2	01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penushahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan pemindahtanganan BMD	BMD	Kab. Tabalong		Rp 186.999.000,00	369.945.800	566.944.800	PAD	2 Dok	616.958.779	a	Bidang Aset
						Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BMD	Kab. Tabalong									
						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	BMD	Kab. Tabalong									

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja SKPD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis kedalam langkah–langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur, dan dengan segala keterbatasan yang ada diharapkan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun dapat berjalan dengan baik secara bertahap dan berkesinambungan dan selalu diupayakan untuk dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan semua pihak memiliki satu persepsi tentang Rencana Kerja sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Tanjung, Juli 2025

Kepala Badan,

